

# PROSIDING

SEMINAR NASIONAL FISIP UNILA  
(SEFILA) - 3 TAHUN 2019

*Agenda Baru Pembangunan Indonesia  
Berbasis Local Knowledge*



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL FISIP  
UNIVERSITAS LAMPUNG (SEFILA) 3  
TAHUN 2019**

**TEMA: AGENDA BARU PEMBANGUNAN INDONESIA  
BERBASIS *LOCAL KNOWLEDGE***

**BANDAR LAMPUNG, 08 AGUSTUS 2019**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2019**

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG  
(SEFILA) 3 TAHUN 2019**

**Tema: Agenda Baru Pembangunan Indonesia Berbasis *Local Knowledge*  
Bandar Lampung, 08 Agustus 2019**

**Susunan Panitia Pelaksana**

Dr. Dedy Hermawan  
Dr. Robi Cahyadi Kurniawan  
Dr. Arif Sugiono  
Dr. Jenni Wulandari  
Arizka Warganegara, Ph.D  
Wulan Suciska, M.Si  
Damayanti, M.Si  
M.Hasbi Kurniawan, M.Si  
Tety Mujadilah, M.Si

**Steering Committee**

Dr. Syarief Makhya  
Dr. Bartoven Vivit Nurdin  
Dr. Ani Agus Puspawati  
Drs. Denden Kurnia Drajat  
Drs. Dadang Karya Bakti

**Reviewer**

Prof. Dr. Yulianto  
Intan Fitri Meutia, Ph.D  
Unang Mulkhan, Ph.D  
Dr. Ari Darmastuti  
Dr. Andi Corry  
Dr. Suropto

**Editor :**

Simon Sumanjoyo Hutagalung, M.P.A  
Ita Prihantika, M.A  
Moh. Nizar, M.A

**Penerbit**

FISIP Universitas Lampung  
vii + 239 hal : 21 x 29 cm  
Cetakan 1, Oktober 2019

**ISBN:978-623-91972-0-9**

**Alamat**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila  
Gedongmeneng Bandar Lampung, HP. 08154019877  
E-mail : [sefilafisip@fisip.unila.ac.id](mailto:sefilafisip@fisip.unila.ac.id), Website : [www.sefila.fisip.unila.ac.id](http://www.sefila.fisip.unila.ac.id)  
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

ISBN 978-623-91972-0-9



## KATA PENGANTAR

Globalisasi telah memasuki era baru yang bernama revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Pada bidang politik misalnya, gerakan-gerakan politis untuk mengumpulkan massa melalui konsentrasi massa telah digantikan dengan gerakan berbasis media sosial. Bidang pemerintahan pun kini juga ditantang untuk melaksanakan birokrasi secara efektif dan efisien berbasis *e-governance*.

Perkembangan media sosial yang masiv juga telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Relasi sosial hubungan masyarakat kini lebih erat terbangun dalam dunia maya, sehingga hubungan dalam dunia nyata justru menjadi relatif. Paradigma bisnis pun bergeser dari penekanan *owning* menjadi *sharing* (kolaborasi) (Prasetyo & Trisyanti, 2018), sebagaimana merebaknya *e-commerce* yang menggeser bisnsi retail (toko fisik). Singkatnya, dalam disruptif akan terjadi *disruptive regulation*, *disruptive culture*, *disruptive mindset*, dan *disruptive marketing* (Khasali, 2018). Tantangan era baru ini tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara yang sama seperti dalam konsep masa lampau. Revolusi industri 4.0 tidak mungkin hanya dihadapi dengan pengembangan teknologi tanpa melibatkan dinamika sosial di dalamnya. Perlu dirumuskan strategi kebijakan nasional melalui kesadaran dan kedewasaan berpikir

Hal tersebut menginisiasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung untuk mengadakan Seminar FISIP Unila (Sefila) 3 yang mengangkat tema mengenai “**Agenda Baru Pembangunan Indonesia Berbasis *Local Knowledge***”. Walaupun mengacu pada konteks ruang dan tempat, pengetahuan lokal (*local knowledge*) memiliki relevansi dalam proses pembangunan, karena memanfaatkan sumber daya yang minimal berbasis karakteristik sosial budaya setempat. Pengetahuan lokal ini dapat ditransfer menjadi kearifan lokal yang bisa dipertukarkan atau dilakukan lintas budaya (World Bank, 1998). Sehingga pengetahuan lokal memiliki elastisitas dalam berbagai masalah dan perubahan, termasuk mewarnai agenda pembangunan di Indonesia

Seminar ini diharapkan dapat menghasilkan kajian diskusi yang dapat berkontribusi dalam menyediakan alternatif solusi bagi agenda pembangunan di Indonesia menghadapi tantangan perubahan dinamika sosial saat ini. Pada akhirnya, luaran dari Seminar FISIP Unila juga diharapkan dapat terpublikasi melalui prosiding dan jurnal terakreditasi, sehingga hasil kajian dapat bermanfaat secara luas bagi kebutuhan pengembangan akademik dalam bidang sosial politik.

Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan prosiding ini dengan penuh kemudahan. Prosiding ini disusun agar akademisi, mahasiswa dan peminat ilmu sosial politik dapat memperluas ilmu tentang ruang lingkup konsep maupun kebijakan ilmu sosial dan politik, khususnya di negara Indonesia, yang disajikan dari berbagai sumber. Walaupun prosiding ini mungkin kurang sempurna namun memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca. Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan prosiding ini.

Bandar Lampung, 9 Oktober 2019  
Ketua Panitia SEFILA 2019

Dr. Dedy Hermawan, M.Si



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
IMPLIKASI DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMANDIRAN, KESEJAHTERAAN DAN KEMISKINAN: SEBUAH HUBUNGAN YANG TAK SELALU SEJALAN (Maulana Mukhlis dan Syarief Makhya) .....	1-11
INTEGRASI SISTEM INFORMASI PADA PEMERINTAHAN DENGAN <i>E- GOVERNMENT</i> (Lies Kumara Dewi dan Henni Kusumastuti).....	13-20
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA WISATA (Ita Prihantika, Bambang Utoyo, Tia Panca Rahmadhani, Sutiyo) .....	21-31
IMPLEMENTASI <i>DIGITAL GOVERNMENT</i> DALAM BIDANG PENDIDIKAN (STUDI TENTANG SISTEM PENILAIAN AKREDITASI BERBASIS ONLINE PADA BADAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019) (Eko Budi Sulistio) .....	33-41
KAJIAN PELUANG PIMPINAN WILAYAH NASYIATUL AISYIYAH LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN KERENTANAN PEREMPUAN PADA KEJAHATAN NARKOBA (Dwi Wahyu Handayani) .....	43-49
<i>KERATUAN SEMAKA FOLKLORE: ETHNO-ECOTOURISM MODEL IN LAMPUNG INDIGENOUS MUSEUM TOURISM DEVELOPMENT</i> (Bartoven Vivit Nurdin) .....	51-59
PENDEKATAN PENGETAHUAN DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA HUTAN MANGROVE (Selvi Diana Meilinda dan Rizca Fiolanda).....	61-69
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL ISLAMI: PEMBERDAYAAN MELALUI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Keumala Hayati dan Indra Caniago) .....	71-74
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI UNTUK MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN DI DESA SRITEJOKENCONO, KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Suwarno, Abdul Syani, Pairulsyah, Dewi Ayu Hidayati, Riki Riyan Saputra).....	75-82
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BUDIDAYA PETERNAKAN IKAN AIR TAWARDI DUSUN BUKIT SULA, DESA BANDING AGUNG, KECAMATAN PUDUH PIDADA, KABUPATEN PESAWARAN (Pairulsyah, Yuni Ratnasari, Fuad Abdulgani, Dewi Ayu Hidayati, Riki Riyan Saputra) .....	83-87
PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PROGRAM LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT (STUDI KELOMPOK WANITA TANI GUYUP RUKUN PEKON SUKOHARJO II	

KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU). (Nurarifah, Rahayu Sulistiowati, dan Nana Mulyana).....	89-93
PERANAN MASYARAKAT LOKAL DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG (Intan Fitri Meutia, Devi Yulianti, Panji Tryatmaja, Vera Yusnita) .....	95-101
MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT TANI HUTAN KEMASYARAKATAN MELALUI PENGUATAN PERAN <i>STAKEHOLDERS</i> DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (Dian Kagungan, Yulia Neta dan Hari Kaskoyo).....	103-112
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGEMBANGAN KLASTER IKAN DI PULAU PASARAN KOTA BANDAR LAMPUNG (Ali Imron, Dewie Brima Atika, Eko Budi Sulistio) .....	113-120
NEO NASIONALISME DAN REVOLUSI DIGITAL DI INDONESIA (Thomas Tokan Pureklolon) .....	121-127
NEW MEDIA SEBAGAI SARANA PROMOSI PARIWISATA LAMPUNG (Agus Mardihartono dan Yuli Evadianti).....	129-134
KEWIRAUSAHAAN TEKNOLOGI DIGITAL: POTENSI PEMBERDAYAAN PEBISNIS MILENIAL (Keumala Hayati dan Indra Caniago).....	135-138
PERAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (Herlintati, Fery Hendi Jaya, M. Fikri Akbar).....	139-143
KUALITAS LAYANAN, HARGA, DAN PERSEPSI BENEFIT MENGGUNAKAN FITUR <i>GO-PAY</i> (Ni Putu Widiyawati, Arif Sugiono, Diang Adistyia, Jeni Wulandari).....	145-157
PERILAKU KOMUNIKASI MASYARKAT TERHADAP PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN: STUDI PEMAKNAAN TERHADAP POSTING INFOGRAFIS TIRTO.ID (Purwanto Putra) .....	159-167
PELINDUNGAN BAHASA LAMPUNG DALAM PERUBAHAN BUDAYA DI PROVINSI LAMPUNG (Bendi Juantara dan Indra Bulan).....	169-176
APLIKASI <i>FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)</i> DALAM ADMINISTRASI DIGITAL (Hani Damayanti Aprilia, Mediya Destalia, Ida Vivi Pusvitha).....	177-184
NEGARA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI: MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI EKONOMI (Gita Paramita Djausal, Fitri Juliana Sanjaya, Eris Ardeanto) .....	185-189
PEMANFAATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI BERBASIS <i>E-COMMERCE</i> BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Roby Rakhmadi) .....	191-196
ANALISIS KONTEN INFORMASI <i>E-GOVERNMENT</i> PADA SITUS WEB PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN (Eka Yuda Gunawibawa, Hestin Oktiani, Gita Hilmi Prakoso) .....	197-206
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA INDUSTRI PARIWISATA (STUDI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI LAMPUNG SELATAN) (Dedy Hermawan dan Simon S. Hutagalung).....	207-217

PENGARUH KUALITAS LAYANAN WEBSITE TERHADAP NIAT PEMBELIAN KEMBALI YANG DIMEDIASI OLEH KEPUASAN KONSUMEN LAZADA.CO.ID DI BANDAR LAMPUNG Anindhyta Sekar Wangi, Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, dan Mudji Rachmat Ramelan.....	2019-226
<i>SUCCESS FACTORS FOR SERVICE INNOVATION THE DJKI OF COPYRIGHT ONLINE RECORDING SYSTEM</i> Dian Sari dan Erlin Windia Ambarsari .....	227-235
<b>LAMPIRAN</b>	
AGENDA BARU PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA BERBASIS PENGETAHUAN LOKAL (Bustanul Arifin)	
AGENDA BARU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS “PENGETAHUAN LOKAL” (Muhammad Najib Azca)	
KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN SDM DI LAMPUNG (Nina Yudha Aryanti)	

# IMPLIKASI DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMANDIRIAN, KESEJAHTERAAN DAN KEMISKINAN: SEBUAH HUBUNGAN YANG TAK SELALU SEJALAN

Maulana Mukhlis<sup>a</sup> dan Syarief Makhya<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup> *Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung*

Korespondensi: maulanamukhlis1978@gmail.com

## Abstract

*In the perspective of government management, fiscal decentralization is one of compulsory strategies for state to build harmonious relationships between government levels both vertically and horizontally. However, was fiscal decentralization really able to realize regional autonomy and public welfare, especially for those regions after administrative expansions? This was the corner stone of this research in Mesuji district (a result of administrative expansion) as the locus. Even though most data collected from interviews and study of regional financial profile were in numbers, this was a qualitative research that was not looking for a correlation (influence) between those numbers directly. The research results showed that ten years after administrative expansion, amount of fund transferred from national government to Mesuji district to support its economy growth was increasing annually. However, it did not yet imply positively to regional autonomy, public welfare, and poverty in this district. Regional dependency could be seen from lower fiscal capacity and high gap of regional fiscal. Regional public welfare could be seen from human development index. Regional poverty could be seen from trends of and employment improvement and numbers of poor people. Why fiscal decentralization that indeed would always imply positively to regional economy growth, distribution improvement, service quality and public welfare improvements was not yet realized in Mesuji district? By using policy implementation approach, this paper is to answer the question.*

*Keywords: local fiscal decentralization; administrative expansion; regional autonomy*

## Abstrak

Dalam perspektif manajemen pemerintahan, desentralisasi fiskal menjadi salah satu strategi wajib bagi negara untuk membangun hubungan yang selaras antar tingkat pemerintahan secara vertikal maupun horizontal. Namun benarkah desentralisasi fiskal dapat mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi daerah-daerah pasca pemekaran? Pertanyaan ini menjadi titik pijak dari penelitian dengan Kabupaten Mesuji (daerah hasil pemekaran) sebagai lokusnya. Meskipun data yang didapatkan baik melalui wawancara maupun penelusuran profil keuangan daerah sebagian besar berbentuk angka, namun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif atau tidak dengan mencari hubungan (pengaruh) langsung antar angka-angka tersebut secara operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga sepuluh tahun pasca pemekaran, meski jumlah transfer dana dari pusat kepada kabupaten Mesuji selalu meningkat setiap tahun namun belum berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonominya. Kondisi kemandirian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan kemiskinan di kabupaten ini juga belum menunjukkan perbaikan berarti sebagai implikasi pelaksanaan desentralisasi fiskal. Ketidakmandirian daerah dilihat dari rendahnya kapasitas fiskal serta tingginya kesenjangan fiskal, kesejahteraan dilihat dari aspek indeks pembangunan manusia, sedangkan kemiskinan dilihat dari *trend* angka partisipasi angkatan kerja dan persentase penduduk miskin. Mengapa desentralisasi fiskal yang sejatinya selalu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan belum berwujud di Kabupaten Mesuji? Dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan, *paper* ini akan menjawabnya.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, implementasi kebijakan, kemandirian daerah

---

## PENDAHULUAN

Salah satu implikasi turunan dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015) menyebutkan bahwa hanya kewenangan pada urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi (peradilan), keuangan (moneter dan fiskal), serta agama yang mutlak dimiliki pemerintah pusat. Selain kelima hal itu, seluruh urusan (wajib maupun pilihan) merupakan kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dengan tanggung jawab penyelenggaraannya lebih banyak dimiliki oleh daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah. Pembagian kewenangan tersebut merupakan substansi dari pola desentralisasi sebagai pilihan atas kegagalan sentralisasi yang selama 32 tahun Orde Baru diasumsikan sebagai biang kegagalan negara dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan di Indonesia.

Akan tetapi, meskipun urusan fiskal adalah kewenangan pemerintah pusat namun sebagai konsekuensi dari pemberian kewenangan kepada daerah terhadap urusan-urusan tertentu maka daerah juga diberikan kewenangan dalam masalah keuangan untuk menunjang pembangunan di daerah. Pemberian kewenangan dimaksud kemudian disebut dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang secara praktik diwujudkan dalam bentuk transfer dana perimbangan serta hak dan kewenangan bagi daerah untuk memungut sumber pendapatan di daerahnya. Oleh karena itu, sebagai instrumen dari otonomi daerah, desentralisasi fiskal adalah wujud dari paradigma keselarasan hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Secara teori, Mardiasmo (dalam Nurman, 2013) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal: (i) mengurangi kesenjangan fiskal baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) maupun antar daerah yang satu dengan daerah yang lain (*horizontal fiscal imbalance*); (ii) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (iii) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya; (iv) peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah sehingga tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; serta (v) mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Adapun secara praktis, menurut Abimanyu dan Megantara (2009) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Urgensi paling lengkap ditegaskan oleh World Bank (1997a) yang memberikan argumentasi bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah dan efek dinamisnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dan argumentasi ini mendapatkan justifikasi yang sangat kuat (World Bank, 1997a).

Di Indonesia, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi telah dijelaskan oleh beberapa penelitian. Penelitian Wibowo (2008) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia selama periode 1999-2004 secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 telah memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim sebelumnya. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Simanjuntak (2010) yang menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah sebagai implikasi dari desentralisasi fiskal.

Namun demikian, hampir semua studi terdahulu di atas hanya membahas isu desentralisasi fiskal dalam perspektif dampak ekonomi, padahal sejatinya terdapat dampak turunan lain dikaitkan dengan tujuan otonomi daerah yakni kemandirian daerah dengan indikasi kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, kajian tentang desentralisasi fiskal di atas juga tidak membedakan antara daerah yang baru terbentuk dengan daerah yang sudah lama berdiri, padahal dari berbagai aspek, daerah otonom baru tentu masih membutuhkan banyak intervensi dari pihak luar sehingga *locus* pada daerah otonom baru sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan kedua argumen tersebut, sejatinya terdapat relasi sangat erat antara kebijakan desentralisasi fiskal dengan kemandirian daerah pasca pemekaran sebagai esensi dari tujuan otonomi daerah di Indonesia.

Merujuk pada ketiga aspek di atas, maka penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang sangat tinggi -salah satunya- karena dilakukan di daerah otonom baru di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Mesuji. Relasi antara substansi dan lokasi, kemudian menghasilkan beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya adalah benarkah desentralisasi fiskal dapat mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mesuji pasca pemekaran termasuk faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?

Kabupaten Mesuji, dengan ibu kota Wiralaga Mulya, adalah salah satu daerah otonom baru di wilayah Provinsi Lampung yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Secara yuridis formal, Kabupaten Mesuji terbentuk sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.

Sepuluh tahun pasca pemekaran atau sampai dengan tahun 2018, evaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro bisa ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di suatu wilayah. Semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada PDRB per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun secara makro. Apabila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. Pada tahun 2018, PDRB per kapita Mesuji atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp.41.209.034,85 dengan pertumbuhan sebesar 10,26% sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp. 30.510.945,40 dengan pertumbuhan sebesar 4,45% sebagaimana terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Mesuji

TAHUN	ADHB (berlaku)	%	ADHK (Konstan)	%
2012	28.024.129,25	8,55	25.302.666,81	4,66
2013	30.251.785,14	7,95	26.664.674,77	5,38
2014	34.000.423,42	12,39	27.960.681,18	4,86
2015	37.373.592,50	9,92	29.211.810,76	4,47
2016	41.209.034,85	10,26	30.510.945,40	4,45

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Mesuji 2017-2022

Dari data pada tabel 1 pada aspek indikator PDRB, dapat dijelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mesuji tiap tahunnya semakin meningkat namun persentase kenaikannya tidak konstan atau terjadi naik-turun tiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi telah ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui pelaksanaan pembangunan pada sektor infrastruktur maupun sektor lainnya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu, diperlukan indikator lain yang lebih luas dalam upaya menilai kemandirian keuangan daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah PAD, DAU, dan TPD Kabupaten Mesuji 2014-2018

Tahun	Jumlah PAD	Jumlah DAU	Jumlah TPD
2014	18.697.799.680	387.694.100.480	555.301.339.136
2015	22.528.499.712	402.889.277.440	655.310.979.712
2016	28.718.079.000	447.672.298.000	782.452.805.570
2017	36.224.899.000	448.282.207.000	743.880.240.150
2018	41.025.735.770	446.272.067.000	846.652.755.127

Sumber : BPS Kabupaten Mesuji, 2019 (diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi kenaikan cukup signifikan dalam hal jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun jumlah Total Pendapatan Daerah (TPD). Namun demikian, dalam kaitan dengan idealitas norma bahwa kenaikan kapasitas keuangan daerah sebagai wujud desentralisasi fiskal akan berimplikasi terhadap kemandirian daerah maupun peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan akan menjadi titik tolak dari penelitian ini, Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mencari implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah, kemiskinan, dan kesejahteraan di Kabupaten Mesuji serta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya implikasi tersebut (baik implikasi positif maupun negatif dari desentralisasi fiskal).

Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pusat ke lingkungan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya (Kaloh, 2002). Adapun Kumorotomo (2008) menyatakan bahwa desentralisasi dalam konteks Indonesia adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan ini kemudian membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan oleh daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pelimpahan pada aspek keuangan dan anggaran ini disebut sebagai desentralisasi fiskal.

- a) Secara konseptual, Bird dan Vaillancourt (2000) menjelaskan bahwa urgensi dari desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:
- b) Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum.
- c) Dalam perspektif politik, negara sebagai organisasi kekuasaan di dalamnya terdapat lingkungan kekuasaan akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, maka diperlukan adanya pemencaran kekuasaan.

Dari perspektif manajemen pemerintahan negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan pendapat Halim (2001) indikator untuk menilai keberhasilan desentralisasi fiskal adalah pada aspek sisi makro-ekonomi dan sisi kesehatan fiskal daerah. Pada aspek sisi makro ekonomi, kinerja otonomi daerah dan dampaknya terhadap indikator-indikator kunci pembangunan dapat dinilai dari beberapa variabel, misalnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan ketimpangan, serta pengentasan kemiskinan. Adapun kinerja otonomi daerah dan dampaknya terhadap kesehatan fiskal daerah dapat dilihat dari beberapa variabel, yaitu pertumbuhan kapasitas fiskal, penurunan ketergantungan dana perimbangan, serta penurunan kesenjangan atau *gap* fiskal.

Dari perspektif manajerial maupun kondisional bagi studi kebijakan, teori implementasi kebijakan dari Abidin (2004) komprehensif dan relevan dipergunakan sebagai landasan analisis. Menurutnya, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dapat dinilai faktor yang mempengaruhinya dengan intisari teoritik sebagai berikut:

1. Bahwa proses implementasi kebijakan (termasuk kebijakan fiskal) ditentukan oleh dukungan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi substansi kebijakan dan dukungan sumber daya, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan dan dukungan masyarakat.
2. Dukungan faktor internal kebijakan secara elaboratif meliputi:
  - (1). Subtansi kebijakan, bahwa suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan jika memiliki substansi:
    - a. tujuan, bahwa tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk membuat kebijakan itu dapat dikatakan baik jika tujuan itu dapat dipahami atau diterima oleh rasionalitas akal sehat serta tujuan itu diinginkan atau memenuhi kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat.
    - b. asumsi, bahwa asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis atau tidak mengada-ada.
    - c. informasi, bahwa informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar atau tidak kadaluwarsa. Kebijakan yang didasarkan pada informasi yang kurang lengkap adalah tidak tepat.
  - (2). Sumber daya, yaitu meliputi:
    - a. sumber daya aparatur, yaitu dukungan aparat pelaksana kebijakan.
    - b. anggaran, yaitu dukungan biaya bagi pelaksanaan kebijakan.
    - c. sarana, yaitu dukungan peralatan dan pelaksanaan kebijakan.
3. Dukungan faktor eksternal kebijakan secara elaboratif meliputi :
  - (1) Kondisi lingkungan kebijakan, menyangkut kondisi sosial politik dan ekonomi.
  - (2) Dukungan masyarakat, yaitu dukungan masyarakat sebagai sasaran (objek) kebijakan yang diimplementasikan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan atau analisa kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif meskipun menghasilkan data kuantitatif dalam bentuk angka namun angka-angka tersebut tidak untuk dicari hubungan atau pengaruhnya. Data berbentuk angka akan dijadikan dasar untuk menghasilkan data kualitatif dalam bentuk kategorisasi, karakteristik berwujud kata-kata atau tulisan/ucapan dan perilaku subjek yang diamati. Lokasi penelitian ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung hasil pemekaran tahun 2008 yaitu Kabupaten Mesuji.

Data yang digunakan berupa data primer maupun sekunder. Data yang berkaitan dengan angka atau jumlah dana perimbangan diperoleh dari data yang dikeluarkan Kementerian Keuangan DJAPK Subdirektorat Dana Perimbangan ([www.sikd.diapk.com](http://www.sikd.diapk.com)) maupun data BPS selama periode tahun 2012-2017. Adapun data PAD diperoleh dari laporan realisasi APBD tahun anggaran 2012-2017. Adapun data primer diperoleh dari wawancara dengan para informan yang dipilih yaitu Kepala BAPPEDA serta Kepala BPKAD di kabupaten lokasi penelitian.

Proses validasi untuk meyakinkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode, sebagai dua tipe triangulasi dari lima tipe sebagaimana dijelaskan Wiersma (dalam Sugiyono, 2007). Triangulasi sumber dipergunakan dengan cara membandingkan informasi yang didapatkan dengan sumber yang berbeda. Adapun triangulasi metode diupayakan dengan menggunakan bukan hanya satu teknik pengumpulan, yakni teknik wawancara dan dokumen untuk mendapatkan fokus data yang sama.

Sebagai batasan, penelitian ini difokuskan pada dua tujuan, yaitu implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah, kesejahteraan dan kemiskinan. Kemandirian daerah dilihat dari kapasitas fiskal daerah dan kesenjangan fiskal daerah. Kesejahteraan dilihat dari aspek indeks pembangunan manusia, sedangkan kemiskinan dilihat dari *trend* angka partisipasi angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin. Adapun untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya desentralisasi fiskal memberikan implikasi pada kemandirian daerah, kemiskinan, dan kesejahteraan akan dianalisis pada dua faktor utama, yaitu faktor internal (meliputi substansi kebijakan dan dukungan sumber daya) serta faktor eksternal (meliputi kondisi lingkungan dan dukungan masyarakat).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kapasitas Dan Kesenjangan Fiskal Kabupaten Mesuji*

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian makro suatu daerah adalah data PDRB. PDRB sendiri dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, antara lain: (a) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, (b) untuk mengetahui struktur perekonomian, (c) untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan, serta (d) untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

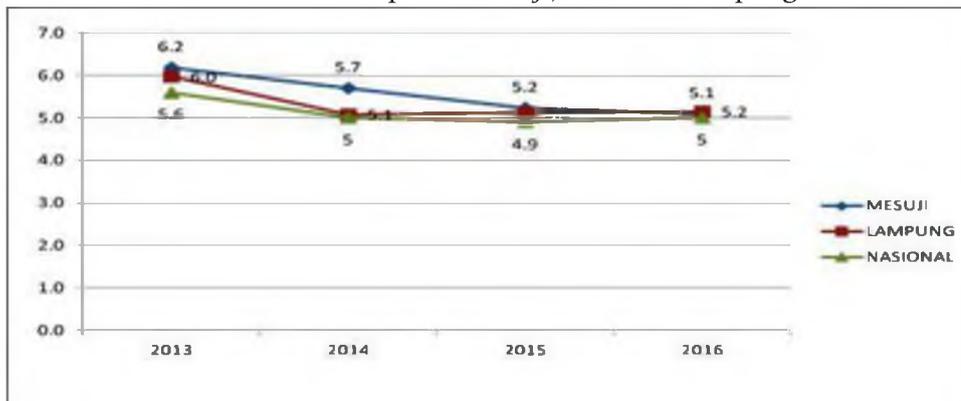
Keempat tujuan tersebut kemudian berimplikasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Tabel 3 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji selama kurun waktu lima tahun terakhir. Jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung maupun secara nasional terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji justru terus mengalami penurunan. Data ini menunjukkan, bahwa pertumbuhan PAD, DAU, maupun TPD di Kabupaten Mesuji sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2 tidak memberikan implikasi positif terhadap pertumbuhan ekonominya.

Tabel 3. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Mesuji Tahun 2012-2017

Kabupaten	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi (Tahun, dalam persen)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mesuji	5,7	5,7	5,7	5,4	5,1	5,3

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji 2017-2012

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji 2017-2012

Fakta ketidakmampuan Kabupaten Mesuji sebagai daerah otonom baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentu membantah pendapat Abimanyu dan Megantara (2009) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Namun demikian, optimisme dapat dibangun karena dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mesuji 2017-2022, pemerintah daerah berani memberikan asumsi bahwa dalam lima tahun ke depan hingga tahun 2022 perkembangan ekonomi dapat diperkirakan melalui target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, sebagaimana terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mesuji

2017	2018	2019	2020	2021	2022
5,23	5,36	5,49	5,62	5,75	5,88

Sumber: RPJMD Kabupaten Mesuji 2017-2012

Indikator lebih detail untuk menilai kemandirian keuangan daerah adalah dengan menghitung kapasitas fiskal dan kesenjangan fiskal. Secara konsep, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya atau disebut dengan derajat otonomi fiskal (Munir & Tangkilisan, 2004). Adapun kesenjangan fiskal adalah selisih antara kapasitas (kemampuan) fiskal yang dimiliki daerah dengan kebutuhan fiskal daerah tersebut untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Munir & Tangkilisan (2004) menambahkan bahwa salah satu tolak ukur kapasitas (kemampuan) keuangan daerah dapat ditunjukkan dalam skala interval Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Apabila persentase jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari 50% dibanding Total Pendapatan Daerah (TPD), maka DOF daerah tersebut sangat baik, interval 40,01% s.d 50% maka kemampuan keuangan daerah tersebut baik, *range* rasio 30,01% s.d 40% berkategori cukup, interval 20,01% s.d 30% berkategori sedang, 10,01% s.d 20% kategori kurang, sedangkan rasio di bawah 10% masuk kategori sangat kurang. Berdasarkan metode ini, tabel 5 menunjukkan kapasitas fiskal Kabupaten Mesuji selama tiga tahun terakhir yang masuk kategori sangat kurang sehingga derajat ketergantungan fiskalnya sangat tinggi.

Tabel 5. Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Mesuji

Kabupaten	2015	2016	2017	Rata-Rata	Kategori
Mesuji	3,67	4,86	4,84	4,45	Sangat Kurang

Sumber: BPS, data diolah, 2019.

Melalui tabel 5 juga dapat dijelaskan bahwa kemampuan PAD Kabupaten Mesuji untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan fiskal daerahnya hanya sebesar 4,45%, sehingga kekurangan (defisit) sebesar 95,55% merupakan kesenjangan yang kemudian ditutup melalui sumber pendapatan lain, terutama transfer dana perimbangan melalui DAU dan DAK serta bantuan pemerintah provinsi. Dalam perspektif hubungan pemerintahan, terjadi ketergantungan fiskal yang sangat tinggi dari Kabupaten Mesuji kepada bantuan level pemerintah di atasnya (pusat dan

provinsi). Dalam kondisi demikian, maka pola hubungan keuangan yang muncul antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah pola hubungan yang instruktif.

### *Indeks Pembangunan Manusia*

Keberhasilan pembangunan sangat didukung oleh tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan pembangunan tersebut. Penduduk dapat bertindak sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Mesuji 2017-2022, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji tahun 2012 adalah 191.221 jiwa, tahun 2013 sebanyak 192.759 jiwa, dan tahun 2014 sebanyak 194.282 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 5 tahun (2012-2016) sebesar 1%. Lebih jelas mengenai jumlah perkembangan penduduk di Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Mesuji 2012-2016

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	Kenaikan/ Penurunan %
1.	Way Serdang	41.567	42.490	42.719	43.096	43.437	1,11%
2.	Sp. Pematang	23.869	24.450	24.709	25.055	25.387	1,55%
3.	Panca Jaya	15.628	15.659	15.650	15.698	15.730	0,16%
4.	Tanjung Raya	34.956	35.313	35.526	35.865	36.172	0,86%
5.	Mesuji	20.306	20.413	20.398	20.453	20.489	0,22%
6.	Mesuji Timur	30.309	30.509	30.552	30.700		0,42%
7.	Rawajitu Utara	24.586	23.925	24.728	24.815	24.878	0,32%
<b>Jumlah</b>		<b>191.221</b>	<b>192.759</b>	<b>194.282</b>	<b>195.682</b>	<b>196.913</b>	<b>0,66%</b>

Secara kuantitatif, persentase kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Mesuji hanya 0,66% per tahun atau lebih kecil jika dibandingkan persentase kenaikan jumlah PAD maupun TPD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji selama 2014-2017. Dalam konteks ini, seharusnya kesenjangan fiskal daerah setiap tahun harus selalu menurun karena salah satu variabel dalam penetapan kebutuhan fiskal daerah adalah jumlah penduduk. Topik ini, belum banyak peneliti yang melakukannya sehingga relasi antara kenaikan TPD dengan kenaikan jumlah penduduk sama sekali belum pernah dikaji.

Pada aspek kependudukan, variabel yang biasa dipakai untuk menilai kesejahteraan sebagai implikasi desentralisasi fiskal adalah pada aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara konsep, IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata-sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak (Syarifullah dan Malik, 2017). Perkembangan nilai IPM di Kabupaten Mesuji dapat dijelaskan pada tabel 7.

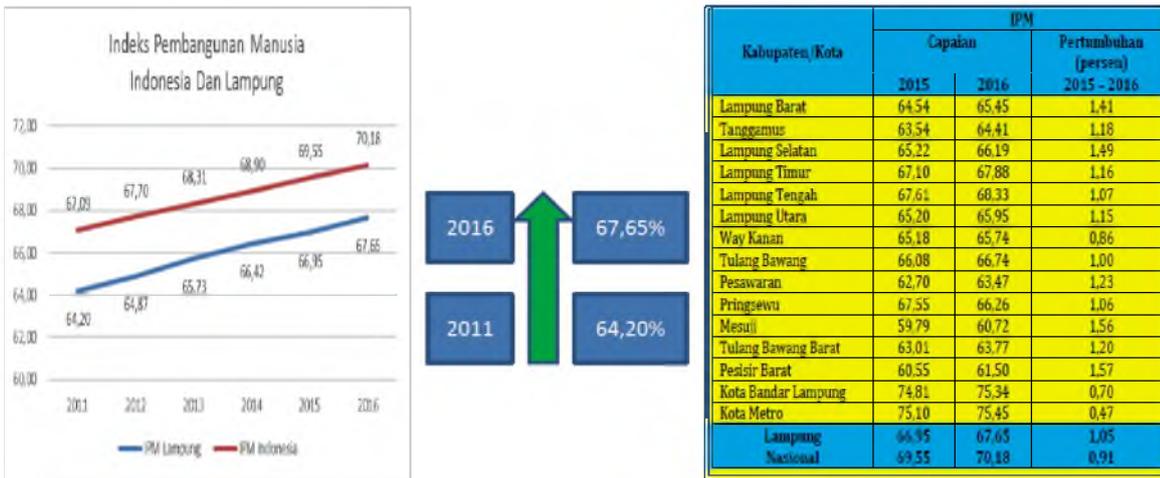
Tabel 7. Perkembangan Nilai IPM Kabupaten Mesuji

<b>Kabupaten</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Mesuji	58,71	59,79	60,72	61,10

Sumber : Data BPS , 2019

Berdasarkan tabel 7 dapat dijelaskan bahwa sebenarnya telah terjadi kecenderungan kenaikan IPM setiap tahunnya, namun demikian jika dibandingkan dengan data-data IPM dari lima belas kabupaten/kota di Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Mesuji yang hanya 61,10 berada pada posisi paling akhir. Ini artinya, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mesuji pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan adalah paling rendah di Provinsi Lampung, di bawah rata-rata IPM provinsi sebesar 67,65 maupun rata-rata IPM secara nasional sebesar 70,18, sebagaimana terlihat pada gambar 1.

Gambar 1. Perbandingan IPM Kab. Mesuji dengan Kab/Kota di Lampung



Sumber : Data BPS , 2019

### Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Pada bagian ini, analisis akan difokuskan pada upaya menjelaskan implikasi dari desentralisasi fiskal terhadap pengentasan kemiskinan dan/atau pengurangan pengangguran. Secara teori, perkembangan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh produktifitas tenaga kerja yang bekerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang dapat dinilai dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan banyaknya penduduk usia kerja yang kemudian dipergunakan sebagai indikator ketenagakerjaan untuk memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode tertentu. Semakin besar TPAK berarti semakin rendah tingkat pengangguran pada penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di daerah tersebut, demikian pula sebaliknya.

Mukhlis dan  
Makhya:  
Implikasi  
Desentralisasi  
Fiskal terhadap  
Kemandirian,  
Kesejahteraan...

Tabel 8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mesuji

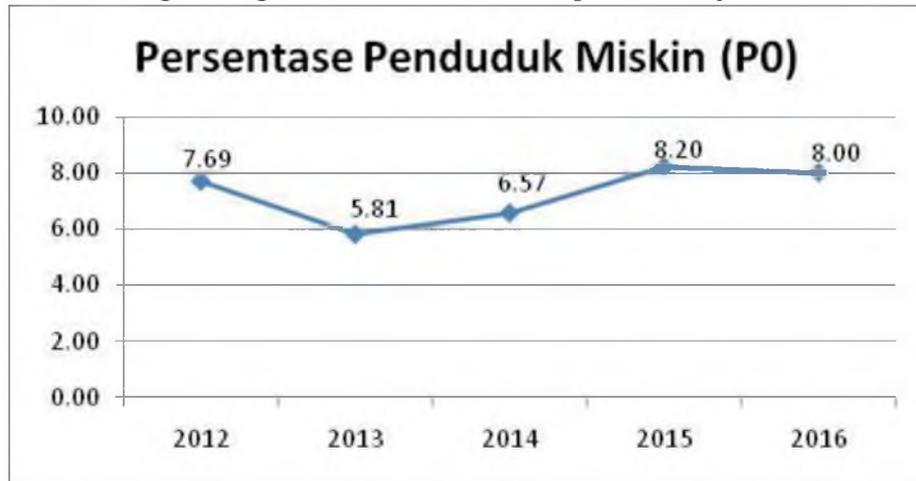
Kabupaten	2015	2016	2017	Rerata
Mesuji	42,27	43,63	44,07	43,32

Sumber: RPJMD Kabupaten Mesuji 2017-2022, diolah.

Gambaran pada tabel 8 menjelaskan bahwa rata-rata TPAK di Kabupaten Mesuji hanya 43,32% yang berarti hanya sebanyak 43% dari jumlah angkatan kerja atau penduduk berusia lebih dari 15 tahun di Kabupaten Mesuji yang bekerja secara tetap. 67% nya berada pada tiga kemungkinan, yaitu pekerja tidak tetap, pencari kerja, serta pengangguran.

Pada aspek lainnya, perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Mesuji dari tahun 2012-2016 meskipun secara garis besar terus meningkat namun pada tahun 2016 mulai menampilkan penurunan. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di Kabupaten Mesuji sebesar 7,69% mengalami penurunan sampai sebesar 5,81% pada tahun 2013, namun mengalami kenaikan kembali sampai tahun 2015 menjadi 8,20%, kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 8,00% pada tahun 2016. Dengan demikian, analisis efektivitas tingkat kemiskinan Kabupaten Mesuji pun capaiannya semakin membaik setiap tahun yang terjadi sejak tahun 2015 sebagaimana terlihat dalam grafik 1.

Gambar 2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mesuji



Sumber: diolah dari RPJMD Kabupaten Mesuji 2017-2022

Analisis tentang kemiskinan, juga dapat dinilai dari indeks kedalaman kemiskinan sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2014 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Mesuji sebesar 0,77%, angka tersebut berada dibawah indeks P1 nasional yaitu sebesar 1,75% dan juga jauh dibawah indeks P1 Provinsi Lampung sebesar 2,3%. Dengan indeks P1 0,77% (<5%) angka ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Mesuji lebih mudah ditanggulangi mengingat hanya sedikit selisihnya antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2010 mencapai angka 1,06. Angka ini pada tahun 2014 menurun sebesar 0,29 hingga menjadi 0,77. Selama periode 2010-2014 penurunan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan per tahun sebesar 0,06. Perkembangan indeks P1 penurunannya tidak konsisten, periode 2010-2013 mengalami penurunan sebesar 0,46 yaitu dari angka 1,06 pada tahun 2010 menurun sampai angka 0,6 pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 mengalami kenaikan hingga mencapai angka 0,77. Hal ini sejalan dengan kenaikan angka garis kemiskinan periode tahun 2010 – 2014 yaitu sebesar 35,20% sehingga menyebabkan beban masyarakat semakin berat dan berdampak juga pada peningkatan tingkat kemiskinan periode tahun 2013-2014 yaitu dari 5,81 pada tahun 2013 menjadi 6,57 pada tahun 2014.

#### ***Analisa Faktor Pendorong dan Penghambat Desentralisasi Fiskal***

Merujuk pada pendapat Abidin (2004) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan implikasinya terhadap pencapaian tujuan kemandirian, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan akan dianalisis dalam dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi substansi kebijakan dan dukungan sumber daya, sedangkan faktor eksternal adalah meliputi kondisi lingkungan dan dukungan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks substansi kebijakan dapat dinyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang berkualitas dan sejatinya harus mampu dilaksanakan minimal oleh dua argumentasi. *Pertama*, bahwa tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk membuat kebijakan desentralisasi fiskal dapat dikatakan sangat baik karena seluruh tujuan dari kebijakan ini dapat dipahami atau diterima oleh rasionalitas akal sehat maupun memenuhi unsur yang diinginkan atau kepentingan masyarakat secara luas. *Kedua*, bahwa asumsi dan informasi yang digunakan dalam proses perumusan kebijakan desentralisasi fiskal sangat lengkap, benar, dan realistis karena telah didasarkan pada perhitungan terhadap kemampuan keuangan daerah maupun kemampuannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan fiskal daerah dalam memenuhi keberfungsian fungsi pemerintahan.

Pada aspek sumber daya, yaitu meliputi sumber daya aparatur yaitu dukungan aparat pelaksana kebijakan, anggaran yaitu dukungan biaya bagi pelaksanaan kebijakan serta sarana mencakup dukungan peralatan dan pelaksanaan kebijakan di daerah, terlihat masih sangat lemah salah satunya disebabkan oleh rendahnya IPM secara makro maupun rendahnya kemampuan keuangan saat ini. Indeks kemampuan rutin dari APBD Kabupaten Mesuji juga sangat rendah sehingga total pendapatan daerah sebagian besar masih terkonsentrasi untuk membiayai belanja

rutin atau gaji pegawai daripada dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pada aspek dukungan faktor eksternal kebijakan yang secara elaboratif meliputi kondisi lingkungan kebijakan menyangkut kondisi politik dan ekonomi serta dukungan masyarakat sebagai sasaran kebijakan, secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Satu-satunya aspek yang memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap kemampuan keuangan Kabupaten Mesuji adalah menyangkut kondisi sosial kabupaten ini yang dalam beberapa tahun terakhir terjadi banyak konflik di masyarakat. Secara faktual, aspek ini memberi dampak pada keengganan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Mesuji sehingga potensi pendapatan daerah tidak dapat meningkat secara signifikan. Kondisi ini sangat mempengaruhi jumlah PAD (kemampuan daerah) yang kenaikannya tidak signifikan dibanding jumlah dana perimbangan (transfer pusat ke daerah).

## SIMPULAN

Desentralisasi fiskal dengan segala instrumennya sejatinya harus berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Total Pendapatan Daerah (TPD) di Kabupaten Mesuji selalu mengalami peningkatan, namun jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung maupun secara nasional terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah PAD, DAU, maupun TPD sebagai wujud desentralisasi fiskal tidak memberikan implikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mesuji.

Pada aspek kemampuan keuangan kurun waktu tiga tahun terakhir pada indikator derajat otonomi fiskal, Kabupaten Mesuji hanya memiliki rasio kemampuan rata-rata sebesar 4,45%. Artinya, kemampuan PAD Kabupaten Mesuji untuk dapat membiayai seluruh kebutuhan daerah hanya sebesar 4,45% sehingga terjadi kesenjangan sebesar 95,55 %. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Mesuji selama tiga tahun terakhir masuk kategori sangat kurang sehingga derajat ketergantungannya kepada level pemerintahan di atasnya menjadi sangat tinggi.

Pada aspek kesejahteraan, jika dibandingkan dengan data IPM dari lima belas kabupaten/kota di Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Mesuji berada pada posisi paling rendah di Provinsi Lampung di bawah rata-rata IPM provinsi maupun rata-rata IPM nasional. Adapun pada aspek kemiskinan, meskipun tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, namun dengan indeks hanya 0,77% (<5%) memperlihatkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Mesuji lebih mudah ditanggulangi mengingat hanya sedikit selisihnya antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

Berdasarkan ketiga temuan tersebut, secara argumentatif dapat disimpulkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal di Kabupaten Mesuji selama sepuluh tahun pasca pemekaran belum memberikan implikasi positif terhadap ketercapaian idealitas tujuan dari kebijakan ini. Dalam arti lain, relasi yang harus terbangun antara desentralisasi fiskal dengan kemandirian daerah, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan belum merupakan hubungan yang selalu sejalan.

Sejatinya, terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung sehingga implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah, kemiskinan, dan kesejahteraan dapat tercapai. Faktor tingginya akuntabilitas informasi dan asumsi sebagai basis penghitungan kapasitas keuangan maupun tingkat penerimaan yang tinggi baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat terhadap pentingnya desentralisasi fiskal adalah modal utama. Hanya saja, aspek sumber daya aparatur di daerah maupun derajat kemampuan anggaran untuk terbebas dari beban pembiayaan rutin masih menjadi faktor penghambat utama di Kabupaten Mesuji sehingga implementasi desentralisasi fiskal belum mampu mencapai idealitas tujuan yang diharapkan.

## REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Abimanyu, A dan Megantara, A. (2009). *Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji. (2018). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022*. Tidak diterbitkan.

- Bird, R. M. dan Vaillancourt, F. (2000). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Halim, Abdul. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Kaloh, J. (2002). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kumorotomo, Wahyu. (2008). *Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1994-2004*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munir, Dasril dan Tangkilisan. (2004) *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Nurman, Muhammad Andry. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional Di Indonesia Tahun 2001-2008. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2013, Hal 1-20.
- Simanjuntak, R. A. (2010). Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu *Grand Design* di Indonesia. *Majalah Prisma*, Volume 29(3). Hal. 35-57.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta
- Syaifullah, Ahmad dan Malik, Nazaruddin. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume1 Jilid 1/2017, Hal. 107 – 119
- Wibowo, P. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, Volume 5(1), Hal. 55-83.
- World Bank. (1997a). *The World Development Report*. New York: Oxford University Press.

